

Analisis Komparatif Pemikiran Filsafat Politik Al-Farabi dan *Platon*

Richo B. Mahendra

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
richomahendra2000@gmail.com

Abstract

This article describes about the original dimensions of al-Farabi's Islamic political philosophy by comparing it with Plato's political philosophy. The originality of philosophical thought in Islam was questioned critically by the orientalists. Orientalists had claimed that Islamic philosophy is simply a diversion from Greek philosophy. However, Islamic philosophy is an elaboration of classical Greek philosophical thought. In the hands of Muslim philosophers, Greek philosophical thought reached perfection. So that it cannot be said that Islamic philosophical thought is only diversion of Greek philosophy. This elaboration effort appears in the thought of Al-Farabi's political philosophy which is considered very Platonic. In this case, there are fundamental differences between Platon's political philosophical thought and the political philosophy thought was built by Al-Farabi. The difference lies in their analysis of the ideal leader, the goals of the state, and the classification efforts of good and bad governance political regimes. Through these differences, it can be seen that Al-Farabi's political philosophy has its own characteristics, that is a combination of faith and philosophy.

Keywords: *Philosophy, Politics, Al-Farabi, Platon,*

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang dimensi original pemikiran filsafat politik Islamnya al-Farabi dengan mengkomparasikannya dengan pemikiran filsafat politik Platon. Orisinalitas pemikiran filsafat dalam Islam dipertanyakan secara kritis oleh para orientalis. Para orientalis berpandangan bahwa filsafat Islam hanya merupakan pengalihan bahasa dari filsafat Yunani. Akan tetapi, filsafat Islam merupakan elaborasi dari pemikiran filsafat Yunani klasik. Di tangan para filosof muslim, pemikiran filsafat Yunani mencapai kesempurnaan. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa pemikiran filsafat Islam hanya merupakan pengalihan bahasa dari filsafat Yunani. Upaya elaborasi ini tampak dalam pemikiran filsafat politik Al-Farabi yang dinilai sangat Platonik. Dalam hal ini, terdapat perbedaan yang mendasar antara pemikiran filsafat politik Platon dan pemikiran filsafat politik yang dibangun Al-Farabi. Perbedaan tersebut terletak pada analisa keduanya tentang pemimpin ideal, tujuan negara, dan upaya klasifikasi tentang rezim politik tata pemerintahan yang baik dan buruk. Melalui perbedaan tersebut terlihat bahwa filsafat politik Al-Farabi memiliki karakteristik tersendiri, yakni pemaduan antara akidah dan filsafat.

Kata kunci : Filsafat Politik, Filsafat Islam, Al-Farabi, Platon,

A. Pendahuluan

Persoalan tentang orisinalitas pemikiran dalam filsafat Islam telah memunculkan perdebatan di antara para cendekiawan muslim dengan para orientalis. Para orientalis menganggap bahwa pemikiran filsafat yang dibangun oleh para filosof Islam klasik tidak orisinal. Sedangkan para cendekiawan muslim yang diwakili oleh pemikir muslim kontemporer seperti Seyyed Hosein Nasr, menyatakan bahwa pemikiran filsafat yang lahir dalam dunia Islam memiliki orisinalitas dan karakteristik yang khas. Meski pandangan Nasr ini ditolak oleh kalangan orientalis, namun terdapat sebagian kalangan orientalis yang mendukung pendapat Nasr tersebut. Sebagian kalangan orientalis tersebut antara lain yakni Oliver Leaman, yang secara cermat mengkaji pemikiran filsafat Islam secara mendalam. Sebagaimana yang diketahui secara lazim, para filosof Islam banyak terinspirasi dari gagasan-gagasan para filosof Yunani klasik, seperti Platon, Aristoteles, hingga Plotinos. Pengaruh filsafat Yunani tersebut tampak dalam pemikiran-pemikiran Al-Farabi dan Ibn Sina. Pemikiran tentang emanasi yang dikembangkan oleh Al-Farabi dan Ibn Sina hampir

memiliki kesamaan dengan filsafat emanasi yang dikembangkan oleh Plotinos. Selain itu, kesamaan pemikiran tersebut tampak pula dalam pemikiran politik dan filsafat jiwa. Gagasan tentang negara utama yang dirintis Al-Farabi memiliki kesamaan dengan konsep negara ideal Platon. Sedangkan, filsafat jiwa Ibn Sina dinilai memiliki kesamaan dengan filsafat jiwa yang sebelumnya telah dikembangkan oleh Aristoteles. Dalam hal ini, sebagian dari kalangan orientalis mempertanyakan orisinalitas pemikiran filsafat yang dibangun oleh para filosof Islam awal. Mereka berpendangan bahwa filsafat Islam tidak lain merupakan filsafat Yunani yang ditulis dalam bahasa Arab.¹ Dengan kata lain, filsafat Islam merupakan pengalihan bahasa dari pemikiran Yunani.

Persoalan yang dibicarakan dalam filsafat Islam di antaranya memiliki kesamaan dengan filsafat Yunani, sehingga terkesan bahwa filsafat Islam hanya sebagai pengalihan bahasa dari filsafat Yunani. Serta pemikiran-pemikiran filsafat Yunani yang masuk ke dalam dunia Islam, diakui banyak kalangan telah mendorong perkembangan filsafat Islam menjadi pesat.² Meski demikian tidak dapat dikatakan bahwa filsafat Islam hanya merupakan pengalihan bahasa dari filsafat Yunani. Pandangan orientalis tersebut sangat bertentangan dengan fakta sejarah. Memang harus diakui bahwa gagasan para filosof Islam sangat dipengaruhi para filosof Yunani. Akan tetapi di tangan para filosof Islam, pemikiran Yunani mencapai kesempurnaan. Hal ini dapat ditemukan dalam pemikiran emanasi Al-Farabi dan Ibn Sina yang telah mencapai taraf kesempurnaan melebihi pemikiran Plotinos sendiri. Dalam emanasi Al-Farabi, Allah diposisikan sebagai pencipta yang bersifat Maha Esa, tidak berubah, jauh dari materi, jauh dari arti banyak, Maha sempurna dan tidak berhajat apapun.³ Hal ini tentu berbeda dengan pendapat Plotinos yang menyatakan bahwa alam merupakan bayangan dari Yang Esa. Pandangan tersebut cenderung mengarah pada panteisme yang bertentangan dengan prinsip Tauhid dalam Islam, di mana Allah Maha Esa diposisikan sebagai pencipta. Pemikiran emanasi Al-Farabi berusaha mengintegrasikan pemikiran emanasi yang dibawa Plotinos dengan prinsip Tauhid dalam Islam.

Orisinalitas dalam pemikiran Al-Farabi juga tampak dalam pemikiran politiknya tentang konsep negara utama. Jika dilihat secara sepintas, konsep negara utama yang dibangun oleh Al-Farabi memiliki kesamaan dengan konsep negara ideal Platon. Filsafat politik Al-Farabi dinilai sangat

¹ Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam: Filosof Dan Filsafatnya* (Depok: Raja Grafindo, 2017), 11.

² Zar, 12.

³ Maftukhin, *Filsafat Islam* (Yogyakarta: Teras, 2012), 98.

Platonik. Kesamaan konsep negara dalam pandangan kedua pemikir ini menjadi salah satu alasan para orientalis dalam menyatakan pendapatnya, bahwa filsafat Islam hanya merupakan pengalihan bahasa dari filsafat Yunani. Tulisan ini berusaha memaparkan filsafat politik antara Al-Farabi dan Platon, serta mencoba menganalisis secara komparatif. Selain itu, melalui analisis secara komparatif ini, tulisan ini mencoba untuk menemukan karakteristik yang khas dalam pemikiran filsafat politik Al-Farabi.

B. Biografi Singkat Al-Farabi dan Platon

Al-Farabi memiliki nama lengkap Abu Nasr Muhammad bin Muhammad ibn Jurhan ibn Uzlaq Al-Farabi.⁴ Ia lahir pada tahun 257 H/870 M, di Wsij, Distrik Farab, Turkistan dan meninggal pada tahun 330 H/945 M. Ayahnya seorang jenderal perang berkebangsaan Persia, sedangkan ibunya berkebangsaan Turki. Al-Farabi merupakan pemikir Islam terbesar yang sangat berpengaruh dalam perkembangan filsafat Islam. Meskipun demikian informasi tentang dirinya sangat terbatas. Menurut beberapa sumber terpercaya, pada usia 40 tahun ia pergi ke Baghdad, di sana ia mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab dan logika. Setelah belajar di Baghdad, kemudian Al-Farabi hijrah ke Harran sebagai pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil dan berguru kepada Yuhanna Ibn Jailan. Akan tetapi, kemudian ia kembali lagi ke Baghdad untuk mendalami filsafat. Selama di Baghdad, ia banyak menggunakan waktunya untuk berdiskusi, mengajar, mengarang, dan mengulas buku-buku filsafat.⁵

Ditinjau melalui berbagai macam karya tulisnya, Al-Farabi menguasai banyak bidang keilmuan di luar filsafat, antara lain matematika, musik, astronomi, kimia, logika, bahasa, dan ilmu-ilmu alam lainnya. Al-Farabi benar-benar memahami filsafat Aristoteles, yang dijuluki sebagai guru pertama. Ibn Sina sebagai filosofi Islam sangat terbantu dalam memahami filsafat Aristoteles melalui buku Al-Farabi yang berjudul *fi Aghradi ma ba'd al-Thabiat*. Dalam buku tersebut, ia menafsirkan pemikiran Aristoteles secara terperinci. Oleh karena itu, dalam dunia intelektual Islam Al-Farabi mendapat julukan sebagai guru kedua.

Platon adalah filosof yang paling berpengaruh di Yunani. Ia lahir pada tahun 427 SM. Platon lahir dari keluarga aristokrat yang sangat berpengaruh dalam percaturan politik di Athena pada saat itu. Ayahnya bernama Ariston yang merupakan keturunan Raja Kodrus, raja terakhir di

⁴ Ilyas Supena, *Filsafat Islam* (Yogyakarta: Ombak Dua, 2013), 91.

⁵ Zar, *Filsafat Islam: Filosof Dan Filsafatnya*, 68.

Athena yang sangat dikagumi karena kecakapannya dalam memerintah. Sedangkan ibunya bernama Periktione yang merupakan keturunan Solon, yang merupakan tokoh legendaris dan negarawan di termahsyur di Athena. Nama Platon yang sebenarnya adalah Aristokles.⁶ Nama Platon disematkan kepadanya karena ia memiliki dahi dan bahu yang amat lebar. Ia mendapat julukan Platon dari guru senamnya.⁷

Platon merupakan salah satu pengikut Socrates sekaligus guru dari Aristoteles. Selama delapan tahun ia menjadi murid Socrates. Pada usia empat puluh tahun, ia mengunjungi banyak tempat seperti Italia dan Sicilia. Setelah kembali dari pengembaraannya ia mendirikan sekolah dengan nama Akademia. Maksud Platon dengan mendirikan sekolah ini ialah, karena ia ingin memberikan pendidikan yang intensif dalam ilmu pengetahuan dan filsafat.⁸ Pemikiran Platon sangat berpengaruh dalam perkembangan filsafat Barat maupun Islam. Ajaran Platon tentang dunia idea dan ide-ide bawaan menjadi titik tolak bagi pemikiran filsafat Aristoteles dan menjadi sumber inspirasi bagi kaum rasionalisme di era modern. Dalam perkembangan filsafat Islam, pemikiran politik Platon sangat berpengaruh dalam pemikiran politik Al-Farabi tentang negara utama. Serta memperlihatkan karakteristik yang khas dalam pemikiran filsafat politik Al-Farabi.

C. Pemikiran Filsafat Politik Platon

Pemikiran politik Platon berangkat dari kondisi politik kota Athena pada saat itu. Pada masa itu, terdapat kesenjangan antara golongan miskin dan kaya. Kekuasaan aristokrasi, oligarki dan demokrasi datang berganti-ganti dalam kota Athena. Menurut Platon nasib Athena hanya dapat tertolong dengan mengubah sama sekali dasar hidup rakyat dan sistem pemerintahan.⁹ Karya Platon yang berjudul *Republic*, menyajikan pandangannya tentang negara.

1. Tujuan Negara dalam Pandangan Platon

Tujuan negara bagi Platon ialah kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, keselamatan orang yang dipimpin lebih diutamakan dengan orang yang dipimpin. Orang yang memerintah harus mempersembahkan

⁶ Ali Maksum, *Pengantar Filsafat: Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 54.

⁷ Platon dalam bahasa Yunani berasal dari kata "Platons" yang berarti kelebaran atau lebar, dengan demikian nama "Platon" berarti "si lebar".

⁸ Harun Hadiwijoyo, *Sari Sejarah Filsafat Barat 1* (Yogyakarta: Kanisius, 1980), 38.

⁹ Muhammad Hatta, *Alam Pikiran* (Jakarta: UI Press, 1980), 108.

hidup mereka bagi pemerintahan, dengan mengorbankan kepentingan diri sendiri.¹⁰ Pemimpin ialah seseorang yang memiliki kecakapan dalam memerintah. Segala macam peraturan dalam negara tidak diputuskan melalui kemauan dan pendapat rakyat, melainkan ditentukan berdasarkan “idea kebaikan”. Seorang pemimpin – menurut Platon – harus memiliki tendensi terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan. Sehingga ia memiliki relasi yang kuat terhadap idea tertinggi, yakni “idea kebaikan”. Termahsyur perkataan Platon yang mengatakan, bahwa kesengsaraan dunia tidak akan berakhir sebelum filosof menjadi raja-raja atau raja-raja menjadi filosof. Menurut Platon, apabila dalam suatu negara memiliki pemimpin filosof, maka kebaikan dalam negara akan tercapai. Kebaikan tersebut berupa kesejahteraan dalam masyarakat.

2. Pemimpin Ideal dalam Pandangan Platon

Seorang pemimpin harus menegakkan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat, berdasarkan idea tertinggi, yakni “idea kebaikan”. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Sejalan dengan filsafat pendidikannya, seorang pemimpin bagi Platon ialah mereka yang memiliki pendidikan tinggi di antara golongan lain. Pendidikan bagi calon pemimpin harus disiapkan sejak dini. Bagi Platon, hanya wanita terpilih yang akan memberikan keturunan sehat. Anak-anak yang telah lahir kemudian ditampung di lembaga-lembaga umum, dan dididik di sana.¹¹ Di sana mereka akan tumbuh bersama dan akan menguatkan ikatan, kasih sayang, gotong royong di dalam diri mereka. Hal ini tentu merupakan modal awal, sehingga mereka dapat menangani urusan kenegaraan dengan mudah. Selama masa pendidikan dini, mereka akan mulai mempelajari kesenian, persajakan, musik, serta mendapat latihan olahraga. Kemudian diadakan seleksi untuk mencari yang terbaik. Tahapan pendidikan terakhir adalah latihan militer dalam jangka waktu dua hingga tiga tahun. Setelah mendapat latihan militer, mereka akan mempelajari ilmu arsitek sederhana, aritmetika, arsitek profesional, ilmu astronomi, serta ilmu-ilmu pasti hingga umur tiga puluh tahun. Selain itu, mereka juga akan memperoleh ilmu tentang dialektika guna mencakapkan mereka dalam memandangkan idea-idea kebaikan. Setelah beranjak umur tiga puluh tahun, mereka akan menghadapi ujian seleksi terakhir. Mereka yang gugur dalam seleksi akan diterima sebagai

¹⁰ Hadiwijoyo, *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*, 44.

¹¹ Dalam filsafat pendidikan Platon, antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan hingga jenjang yang paling tinggi. Sehingga keduanya memiliki potensi yang sama untuk menjadi seorang pemimpin.

pegawai negeri, sedangkan mereka yang lulus akan memperoleh pelajaran tentang idea dan dialektika selama lima tahun. Setelah tamat pelajaran itu, selama lima belas tahun mereka akan dibebani segala macam tugas kemiliteran dan administrasi. Akan tetapi, persoalan-persoalan kenegaraan yang rumit tidak dibebankan kepada mereka. Setelah berumur lima puluh tahun, mereka akan masuk ke dalam lingkungan pemerintahan atau filosof. Pengetahuan dan pengalaman mereka dalam teori dan praktik telah dianggap cukup dalam melaksanakan tugas tertinggi dalam negara, yakni menegakkan kesejahteraan dan keadilan berdasarkan idea tertinggi.¹²

Selain menguraikan secara mencalam tentang jenjang-jenjang pendidikan yang harus ditempuh oleh seorang pemimpin, dalam pemikiran politiknya Platon juga secara rinci menguraikan kriteria pemimpin ideal. Terdapat sembilan kriteria yang dikemukakan Platon. Sembilan kriteria tersebut ialah kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, cinta total terhadap wujud yang abadi, cinta kejujuran dan membenci kebohongan, meninggalkan kenikmatan jasmaniah dan memfokuskan pada kenikmatan pikiran, memiliki sikap yang kuat dalam menerima keadaan dan kesucian diri, menjauhi segala sesuatu yang buruk dan membuang rasa takut, hidup secara asketik dan tidak takut mati, memiliki daya imajinasi tinggi, memiliki keluasan dan keindahan. Konsepsi mengenai kriteria pemimpin ideal ini sangat mempengaruhi pemikiran Al-Farabi.

3. Konsep Negara Ideal dalam Pemikiran Politik Platon

Tujuan negara bagi Platon adalah kesejahteraan dan keadilan. Bagi Platon, keadilan negara dapat tercapai apabila terdapat pembagian kerja dalam masyarakat. Masyarakat terbagi dalam tiga kelas yang memiliki spesialisasi dan peran masing-masing dalam masyarakat. Menurut Platon terdapat tiga kelas warga dalam negara ideal.¹³ *Pertama* golongan pemimpin, golongan ini merupakan tingkatan yang paling tinggi dalam masyarakat. Mereka dibebankan oleh urusan pemerintahan dan administrasi pengelolaan negara dengan akal dan kebijaksanaan.¹⁴ *Kedua* golongan pembantu, golongan ini terdiri dari para prajurit yang bertujuan menjamin keamanan dan ketaatan para warga negara. Mereka mendedikasikan dirinya untuk masyarakat. *Ketiga* golongan terendah,

¹² Hatta, *Alam Pikiran*, 114.

¹³ Garvey James, *20 Karya Filsafat Terbesar* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 8.

¹⁴ Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Barat Dan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 14.

yang terdiri dari para pekerja buruh, pedagang dan petani. Golongan ini bertugas menopang ekonomi negara. Mereka berkewajiban mengamankan sektor produksi guna keberlangsungan hidup masyarakat dalam suatu negara. Dalam hal ini, suatu kebijakan negara hanya diputuskan oleh golongan pemimpin atau filosof. Karena ia senantiasa dibimbing oleh idea tertinggi, yakni “idea kebaikan”. Pemimpin merupakan seorang filosof yang memiliki keteladanan dan kebaikan, serta berbekalkan kebijaksanaan. Oleh karena itu, segala kebijakan harus ditetapkan oleh filosof sebagai pemimpin.

Pemikiran filsafat politik Platon memiliki kaitan erat dengan filsafat jiwanya. Dalam pemikirannya tentang jiwa, Platon membagi jiwa menjadi tiga macam. *Pertama*, jiwa rasional, yang dihubungkan dengan keutamaan tinggi, yakni kebijaksanaan. Keutamaan ini dapat dicapai dengan menjaga kesucian diri dan keberanian. Jiwa rasional sebagai tingkatan paling tinggi bertempat di akal. *Kedua*, jiwa amarah atau keberanian. Jiwa ini dihubungkan dengan keutamaan keberanian atau kegagahan, yang bertempat di bagian dada.¹⁵ Cara memperoleh keutamaan tersebut ialah dengan menghadapi berbagai kendala. *Ketiga*, jiwa sensualitas atau nafsu, yang dihubungkan dengan keutamaan pengendalian diri atau menjaga kesucian diri. Jiwa sensualitas merupakan tingkatan paling rendah yang bertempat di bagian bawah perut. Cara memperoleh keutamaan tersebut dengan mengekang kenikmatan duniawi dan senantiasa memerangi sikap berlebihan dan melampaui batas. Bagi Platon, ketiga struktur jiwa ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam menjelaskan keterkaitan antara ketiga jiwa ini, Platon menggunakan analogi seorang kusir yang sedang mengedalikan anak sapi dengan dua tali kekang berwarna hitam dan putih. Tali berwarna hitam melambangkan jiwa sensualitas, sedangkan tali berwarna putih melambangkan jiwa keberanian. Kusir melambangkan jiwa rasional, yang bertugas menyelaraskan dua tali tersebut. Keadilan muncul apabila akal dan keutamaannya berhasil menyetarakan dua tali kendali tersebut. Dengan kata lain, keadilan akan timbul apabila jiwa-jiwa tunduk pada jiwa yang berakal.

Platon mengaitkan teori jiwanya dengan pemikiran politiknya. Platon membagi tiga kelas dalam masyarakat yang terdiri dari golongan pemimpin, golongan pembantu, dan golongan terendah. Golongan pemimpin terdiri dari para filosof yang bertugas mengatur dalam negara dengan akal dan kebijaksanaan. Para pemimpin memiliki keutamaan kebijaksanaan. Golongan pembantu terdiri dari tentara yang bertugas

¹⁵ Hadiwijoyo, *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*, 42.

menjaga negara dari ancaman luar. Orientasi hidup mereka didedikasikan untuk umum, dan karenanya mereka tidak memiliki kehidupan pribadi.¹⁶ Golongan pembantu yang mendedikasikan hidup mereka bagi negara memiliki keutamaan keberanian. Sedangkan golongan terendah terdiri dari para pekerja yang bertugas menopang perekonomian dalam negara. Mereka memiliki keutamaan pengendalian diri. Dalam pandangan Platon, keadilan akan tercipta jika tiap kelas berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing, tidak saling memberontak.¹⁷ Dengan kata lain, tiap warga negara harus menjalankan fungsinya masing-masing dan tunduk pada negara yang dipimpin oleh filosof.

4. Klasifikasi Bentuk Pemerintahan dalam Pemikiran Politik Platon

Dalam pemikiran politiknya, Platon tidak hanya membatasi diri pada analisa secara menyeluruh tentang konsep negara ideal. Melainkan dalam pemikiran politiknya, Platon secara rinci juga berusaha mengklasifikasikan bentuk pemerintahan. Dalam upayanya mengklasifikasikan bentuk pemerintahan, Platon berusaha menjelaskan berbagai konsekuensi dari setiap tipe dan bentuk negara. Platon juga berbicara mengenai rezim politik yang baik dan buruk, melalui penjelasannya secara mendalam tentang bentuk-bentuk pemerintahan. Menurut Platon, bentuk pemerintahan secara garis besar terbagi dalam lima macam, yakni aristokrasi, temokrasi, oligarki, demokrasi, dan depotisme (tirani).¹⁸

Aristokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan kelompok kecil atau beberapa kelompok. Menurut Platon, bentuk pemerintahan ini merupakan bentuk paling ideal dari bentuk pemerintahan lainnya. Sejalan dengan konsep negara idealnya, melalui bentuk pemerintahan seperti ini akan muncul kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesucian diri. Hanya saja, desakan-desakan ekonomi dan psikologi telah mengakhiri bentuk pemerintahan seperti ini, maka bermunculanlah empat bentuk pemerintahan tanpa keadilan.¹⁹

Bentuk pemerintahan yang muncul setelah Aristokrasi adalah Temokrasi. Temokrasi merupakan bentuk pemerintahan militerisme. Pada model pemerintahan ini, terjadi kesenjangan antara ketiga kelas dalam masyarakat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam negara ideal Platon.

¹⁶ Alim Roswanto, "Filsafat Sosial-Politik Platon Dan Aristoteles," *Jurnal Refleksi* 15, no. 2 (2015), 127.

¹⁷ Muhammad, *Filsafat Politik Antara Barat Dan Islam*, 36.

¹⁸ Muhammad, 36.

¹⁹ Muhammad, 36.

Kesejahteraan golongan terendah yang terdiri dari para pekerja semakin terpuruk. Sedangkan golongan pemimpin dan pembantu semakin sejahtera. Terjadi perbudakan dan eksploitasi terhadap para pekerja dalam bentuk pemerintahan ini. Kemudian muncul bentuk pemerintahan baru, yakni oligarki.

Oligarki merupakan bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipimpin oleh minoritas kelompok elit kecil. Menurut Platon, bentuk pemerintahan ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari timokrasi. Dalam bentuk pemerintahan ini, terjadi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Bentuk pemerintahan oligarki telah memperluas jurang antara kaya dan miskin. Kedua kelompok ini saling bermusuhan, sehingga menyebabkan perpecahan dalam negara. Bentuk pemerintahan ini melahirkan kejahatan dalam masyarakat. Sehingga keutamaan, kebijaksanaan, dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan hilang dalam bentuk pemerintahan ini. Bentuk pemerintahan oligarki ini kemudian melahirkan bentuk pemerintahan yang baru, yakni demokrasi.

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Perpindahan bentuk pemerintahan ini semakin sempurna ketika terjadi pemberontakan dari kalangan miskin terhadap para penguasa oligarki. Pemberontakan kaum miskin ini didukung oleh kalangan cendekiawan yang juga ditindas oleh para penguasa oligarki. Pemberontakan ini melahirkan seruan kebebasan. Sehingga melahirkan bentuk pemerintahan yang baru, yakni demokrasi. Menurut Platon, kebebasan dalam demokrasi kemudian menjadi tidak terkendali. Sehingga memunculkan suatu bentuk pemerintahan baru, yakni depotisme atau tirani.

Depotisme merupakan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan segelintir orang-orang pintar. Dalam hal ini terjadi konsentrasi kekuasaan yang akan menciptakan penindasan, sebagaimana dalam bentuk pemerintahan timokrasi dan oligarki. Pemerintahan dan peradilan dikendalikan oleh segelintir orang-orang pintar yang memiliki kekuasaan. Orang-orang bijak dan para pemberontak dipenjarakan. Dalam bentuk pemerintahan depotisme, tercipta perbudakan dan penindasan terhadap rakyat secara sempurna.

Klasifikasi bentuk pemerintahan oleh Platon sangat berkaitan erat dengan pandangannya tentang negara ideal. Menurut Platon bentuk pemerintahan yang sangat mendukung terbentuknya negara ideal ialah aristokrasi. Sebab, dalam pemerintahan ini pendidikan, persoalan perempuan dan anak menjadi tanggungan bagi pemerintah. Para

pemimpin tidak dilibatkan dalam pengelolaan harta, mereka mengabdikan diri secara penuh terhadap negara.

D. Pemikiran Filsafat Politik Al-Farabi

Filsafat negara utama yang dicetuskan oleh Al-Farabi berangkat dari situasi politik di zamannya. Latar belakang lahirnya filsafat Al-Farabi ini disebabkan terjadinya kegoncangan politik pada Daulat Bani Abbas di bawah tekanan para diktator di zaman Khalifah Al-Radi (332-329 H/934-940 M), Muttaqi (329-333 H/940-944 M), dan Mustakfi (333-334 H/944-945 M).²⁰ Pada masa itu, para penguasa lebih tepat disebut sebagai raja, ketimbang seorang khalifah. Filsafat Politik Al-Farabi sangat Platonik, di mana pemikiran politiknya sangat mencerminkan citra ideal filsafat politik Platon.²¹ Akan tetapi pemikiran politik Al-Farabi tidak hanya dipengaruhi Platon. Dalam pemikiran politiknya, Al-Farabi juga dipengaruhi oleh Aristoteles. Pengaruh tersebut tampak dalam analisa Al-Farabi tentang kodrat manusia. Al-Farabi menekankan gagasan Aristotelian tentang manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politikon*) dalam negara. Kerja sama antar-manusia, yang patuh pada raja-filosof yang diilhami Tuhan, membawa kepada kebahagiaan hakiki di negara sempurna yang utopis melalui kebajikan-kebajikan, terutama kebajikan-kebajikan intelektual, dan melalui perbuatan-perbuatan baik dengan patuh dan taat kepada hukum, *Syariah*.²² Dalam hal ini, Al-Farabi berusaha mengkolaborasikan antara pemikiran Aristoteles dengan Platon.

1. Tujuan Negara dalam Pandangan Al-Farabi

Sebagaimana dalam filsafat politik Platon, kebahagiaan masyarakat merupakan tujuan utama dalam negara. Setiap negara harus memiliki tujuan yang harus dicapai. Al-Farabi menegaskan bahwa setiap warga negara harus mempunyai ide (*Ara'u*) yang harus diperjuangkan secara terus menerus dan menuju kepada suatu titik yang terakhir dari negaranya, yang menjadi harapan dan tujuan bersama.²³ Tujuan itu ialah kebahagiaan. Akan tetapi, kebahagiaan tersebut tidak hanya bersifat duniawi, melainkan juga ukhrawi. Dengan kata lain, tujuan dalam negara adalah menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat.

²⁰ Zar, *Filsafat Islam: Filosof Dan Filsafatnya*, 83.

²¹ Oliver Leaman, *Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam Jilid I* (Bandung: Mizan, 2003).

²² Oliver Leaman, *Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam Jilid II* (Bandung: Mizan, 2003).

²³ Abdullah Said, "Filsafat Politik Al-Farabi," *Islamic Theology and Philosophy* 1, no. 1 (2019), 66.

2. Analisa Al-Farabi tentang Masyarakat Sempurna dan Tidak Sempurna

Al-Farabi berpandangan bahwa manusia pada hakikatnya bersifat sosial. Pandangan ini sejalan dengan Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia sebagai *zoon politicon*. Sifat sosial manusia berada secara inheren dalam diri manusia. Manusia memiliki kecenderungan untuk bersosialisasi, yang pada akhirnya menciptakan kumpulan manusia atau masyarakat yang berbeda-beda. Dalam hal ini, Al-Farabi membagi masyarakat menjadi dua, yakni masyarakat sempurna dan masyarakat tidak sempurna. Masyarakat sempurna terdiri dari tiga tingkatan, yakni masyarakat besar, masyarakat sedang, dan masyarakat kecil. Masyarakat besar terdiri dari gabungan bangsa-bangsa yang saling menopang satu sama lain, atau dapat disebut sebagai perserikatan bangsa-bangsa. Masyarakat sedang terdiri dari satu bangsa yang menghuni suatu wilayah.²⁴ Dengan kata lain, masyarakat sedang merupakan negara yang terdiri atas beberapa wilayah. Sedangkan masyarakat kecil, terdiri dari rakyat-rakyat yang menghuni suatu wilayah, atau dengan kata lain masyarakat kecil berupa negara kota. Al-Farabi menegaskan bahwa masyarakat kecil yang berupa negara-kota adalah sistem politik yang sempurna.²⁵ Sedangkan menurut Al-Farabi, masyarakat tidak sempurna adalah komunitas di desa, kampung, lorong, dan rumah. Pandangan Al-Farabi tentang masyarakat tidak sempurna berangkat dari pembacaannya terhadap karya Platon yang berjudul *Republic*. Al-Farabi tidak menemukan pembahasan mengenai keberadaan sistem keluarga dalam negara.²⁶ Sebagaimana yang diketahui secara lazim, pemikiran politik Platon yang termaktub dalam *Republic* mengabaikan keberadaan keluarga dalam negara. Pandangan Al-Farabi ini tentu bertentangan dengan pandangan Aristoteles, yang menyatakan bahwa keluarga sebagai sel utama dalam kosntruksi masyarakat.

3. Konsep Negara Utama dalam Pemikiran Politik Al-Farabi

Melalui karyanya yang berjudul *Ara Ahl al-Madhinah al-Fadhilah*, Al-Farabi membagi negara menjadi negara utama, negara jahil, negara sesat,

²⁴ John W. Watt, "From Themistius to Al-Farabi: Platonic Political Philosophy and Aristotle's Rhetoric in the East," *Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric* 13, no. 1 (1995): 17–41, <https://doi.org/10.1525/rh.1995.13.1.17>; Peter E. Pormann, "Al-Fārābī, the Melancholic Thinker and Philosopher Poet," *Journal of the American Oriental Society* 135, no. 2 (2015): 209–24, <https://doi.org/10.7817/jameroriesoci.135.2.209>.

²⁵ Muhammad, *Filsafat Politik Antara Barat Dan Islam*, 355.

²⁶ Erez Naaman, "Nurture over Nature: Habitus from al-Fārābī through Ibn Khaldūn to 'Abduh," *Journal of the American Oriental Society* 137, no. 1 (2017): 1–24, <https://doi.org/10.7817/jameroriesoci.137.1.0001>; MICHAEL SWEENEY, "GREEK ESSENCE AND ISLAMIC TOLERANCE: AL-FARABI, AL-GHAZALI, IBN RUSH'D," *The Review of Metaphysics* 65, no. 1 (2011): 41–61.

dan negara fasik. Akan tetapi, Al-Farabi lebih fokus kepada analisa negara utama. Negara utama, sebagai salah satu masyarakat yang sempurna (*al-mujtami' al-kalimah*), dalam arti masyarakat yang sudah lengkap bagian-bagiannya, diibaratkan oleh Al-Farabi sebagai organisme tubuh manusia dengan anggota yang lengkap.²⁷ Setiap organ tubuh harus bekerja sesuai dengan fungsinya. Apabila satu organ sakit, maka organ yang lain akan ikut merasakan dan saling menjaga satu sama lain. Oleh karena itu, Al-Farabi menekankan pentingnya sikap sosial dalam masyarakat. Kebahagiaan dalam suatu negara akan tercapai apabila. Pandangan Al-Farabi ini tentu sangat terinspirasi dengan Platon, tentang pembagian kerja dalam tiap-tiap kelas masyarakat. Akan tetapi dalam pemikiran Al-Farabi, tidak ditemukan penjelasan tentang kelas-kelas masyarakat dalam negara, sebagaimana dalam pemikiran Platon. Dalam organ tubuh itu ada bagian penting, yakni bagian jantung. Organ jantung diibaratkan Al-Farabi sebagai pemimpin atau kepala negara. Menurut Al-Farabi, seorang pemimpin harus memiliki kriteria-kriteria khusus.

4. Pemimpin Ideal dalam Pandangan Al-Farabi

Bagi Al-Farabi, hanya orang-orang tertentu yang dapat menjadi kepala negara. Al-Farabi menyebutkan terdapat dua belas kriteria yang harus dimiliki oleh seorang kepala negara. Dua belas kriteria tersebut meliputi kesempurnaan anggota jasmani, pemahaman yang baik, intelektualitas yang tinggi, memiliki kepandaian dalam mengemukakan pendapat, mencintai pendidikan, tidak serakah dalam hal makanan dan wanita, mencintai kebenaran, berjiwa besar untuk mencintai kemuliaan, tidak hidup mewah dan berfoya-foya, mencintai keadilan dan membenci kezaliman, sanggup menegakkan keadilan dan sukar untuk melakukan tindakan keji dan kotor, dan memiliki pendirian yang kuat terhadap sesuatu yang layak untuk dikerjakan. Jika ditinjau secara lebih lanjut, kriteria kepala negara yang dikonsepsikan Al-Farabi sangat memiliki kemiripan dengan yang dikonsepsikan oleh Platon. Sehingga memiliki kesan bahwa konsepsi mengenai pemimpin ideal hanya mengikuti Platon. Akan tetapi, ada satu kriteria lagi yang ditetapkan oleh Al-Farabi, yakni memiliki akal mustafad yang dapat berkomunikasi dengan akal kesepuluh sebagai pengatur bumi dan penyampai wahyu. Konsepsi Al-Farabi tentang kepala negara yang ideal ini berangkat dari filsafat kenabiannya. Dalam filsafat kenabiannya, Al-Farabi berusaha membuktikan bahwa kebenaran yang diperoleh antara filosof dengan Nabi memiliki sumber yang sama, yakni berasal dari akal kesepuluh. Perbedaannya hanya terletak pada cara

²⁷ Zar, *Filsafat Islam: Filosof Dan Filsafatnya*, 85.

memperolehnya. Filosof memperoleh kebenaran dari akal kesepuluh melalui akal perolehan (akal mustafad) dengan latihan-latihan. Sedangkan Nabi memperoleh kebenaran dengan akal hads yang memiliki daya imajinasi yang kuat, melebihi akal perolehan yang dimiliki oleh para filosof. Akal hads merupakan anugerah langsung dari Allah, dan hanya dimiliki oleh para Nabi. Oleh karena itu, pemimpin yang paling ideal bagi Al-Farabi ialah Nabi maupun filosof, karena mereka memiliki kesanggupan dalam berhubungan dengan akal kesepuluh. Selain berperan dalam mengatur negara, seorang kepala negara juga berperan sebagai pengajar atau pendidik terhadap anggota masyarakat yang dipimpinnya. Apabila tidak ada sifat-sifat kepala negara yang ideal, jabatan kepala negara dapat diserahkan kepada orang lain yang memiliki sifat-sifat paling mendekati dengan sifat-sifat yang dimiliki negara ideal. Kepala pemerintah tersebut dipilih oleh rakyat dari warga yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni memiliki sifat-sifat yang dekat dengan sifat-sifat yang dimiliki kepala negara ideal.²⁸

5. Klasifikasi Negara Tidak Sempurna dalam Pemikiran Politik Al-Farabi

Sebagaimana dalam pemikiran politik Platon, Al-Farabi tidak hanya berhenti pada analisa tentang negara yang memiliki ciri sempurna (negara utama). Melainkan secara rinci ia berusaha mengklasifikasikan negara-negara yang memiliki ciri-ciri yang bertolakbelakang dengan negara utama. Dalam pemikiran politiknya, Al-Farabi juga menguraikan keragaman penyimpangan dari keadaan ideal yang mungkin terjadi, dengan mengikuti gaya pembahasan Platon mengenai rezim politik antara yang baik dan yang jahat.²⁹ Al-Farabi membagi negara tidak sempurna menjadi tiga kategori umum, yakni negara jahil, negara fasik, dan negara sesat.

Negara jahil memiliki masyarakat yang tidak mengenal kebahagiaan. Selain itu, mereka gagal dalam memahami hakikat kemanusiaan, kedudukannya dalam kosmos, dan tujuan alamiahnya.³⁰ Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang tujuan yang benar, oleh karenanya menggantikan tujuan yang benar dengan tujuan yang salah. Al-Farabi membagi negara jahil menjadi enam macam, yakni negara primitif, negara hedonis, negara hina dan sakit, negara penghormatan atau timokratik, negara tirani atau despotis, negara anarkis. Negara primitif ialah negara

²⁸ Zar, 87.

²⁹ Leaman, *Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam Jilid I*, 239.

³⁰ Leaman, 239.

yang memiliki masyarakat yang hanya memerhatikan kebutuhan pokok hidup. Penduduknya hanya mencari nafkah untuk sekedar memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Negara hedonis adalah negara yang penduduknya hanya memerhatikan kekayaan dan penumpukan materi. Penduduknya menjadikan harta sebagai tujuan utama. Negara hina dan sakit yakni negara yang penduduknya hanya mementingkan kenikmatan hawa nafsu. Negara penghormatan yakni negara yang penduduknya hanya mementingkan kehormatan dan popularitas. Penduduknya berorientasi pada gengsi dan kehormatan publik. Sedangkan negara anarkis ialah merupakan negara yang penduduknya memiliki keinginan kuat untuk merdeka dalam melakukan keinginannya masing-masing. Penduduknya tidak memiliki tujuan tunggal yang memotivasi sebagaimana yang terdapat dalam negara ideal.

Selain negara jahil, terdapat negara yang juga memiliki ciri yang bertolakbelakang dengan negara ideal, yakni negara fasik. Negara fasik terdiri dari masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang hal yang baik, sebagaimana yang terdapat dalam negara utama. Akan tetapi, mereka tidak mengerjakan hal baik tersebut. Dengan kata lain, meskipun memiliki pengetahuan tentang hal yang baik, mereka berperilaku seperti masyarakat negara jahil. Mereka memiliki pengetahuan tentang kebahagiaan, Allah, dan akal aktif. Akan tetapi mereka senantiasa berbuat kehinaan.

Selain itu terdapat pula negara tidak sempurna yang memiliki ciri sebagaimana terdapat dalam negara jahil dan fasik, yakni negara sesat. Negara ini memiliki masyarakat yang tidak meyakini adanya Allah dan akal aktif. Pemimpin dalam negara ini menipu masyarakatnya dengan mengklaim dirinya sebagai penerima wahyu. Serta memaksa mereka untuk tunduk pada ucapan dan perbuatannya.

E. Analisis Komparatif Pemikiran Politik Al-Farabi dan Platon

Pemikiran filsafat politik Al-Farabi dinilai sangat Platonik. Jika ditinjau secara sekilas, pemikiran politik Al-Farabi memiliki kesamaan dengan Platon. Akan tetapi jika dilihat secara lebih rinci, terdapat perbedaan antara pemikiran politik Platon dengan pemikiran politik yang dikembangkan Al-Farabi. Selain itu, keduanya berangkat dari pemikiran filsafat yang berbeda. Pemikiran politik Platon berangkat dari filsafat jiwa dan filsafat pendidikannya, sedangkan pemikiran politik Al-Farabi berangkat dari filsafat kenabiannya. Hal ini yang tentu menghasilkan

perbedaan pemikiran filsafat politik yang meliputi pemimpin ideal, tujuan negara, serta klasifikasi rezim politik yang baik dan buruk. Sebab keduanya berangkat dari titik tolak yang berbeda. Bahkan pemikiran filsafat politik Al-Farabi sendiri memiliki karakteristik yang khas, yang tentu berbeda dengan Platon.

Dalam konsep negara ideal yang dikembangkan oleh Platon, seorang pemimpin harus memiliki keterikatan dengan idea kebaikan. Oleh karena itu, pemimpin yang ideal adalah seorang filsuf. Keterikatan pada idea kebaikan tersebut hanya mungkin apabila seorang pemimpin negara (filsuf) telah menempuh pendidikan yang tinggi, dan siap memangku jabatan kenegaraan. Pandangan Platon tentang pemimpin ideal tersebut berkaitan erat dengan filsafat pendidikannya. Kriteria pemimpin ideal. Terdapat sembilan kriteria yang dikemukakan Platon. Selain itu Platon juga menguraikan secara rinci kriteria pemimpin ideal. Kriteria tersebut ialah kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, cinta total terhadap wujud yang abadi, cinta kejujuran dan membenci kebohongan, meninggalkan kenikmatan jasmaniah dan memfokuskan pada kenikmatan pikiran, memiliki sikap yang kuat dalam menerima keadaan dan kesucian diri, menjauhi segala sesuatu yang buruk dan membuang rasa takut, hidup secara asketik dan tidak takut mati, memiliki daya imajinasi tinggi, memiliki keluasan dan keindahan. Sebagaimana Platon, Al-Farabi dalam pemikiran politiknya juga menguraikan kriteria yang harus dimiliki sebagai seorang pemimpin negara. Jika ditinjau secara sekilas, kriteria yang dipaparkan oleh Al-Farabi memiliki kesamaan dengan Platon. Akan tetapi, terdapat satu kriteria yang ditonjolkan oleh Al-Farabi, yang tidak terdapat dalam pemikiran Platon. Kriteria tersebut adalah seorang pemimpin ideal ialah seseorang yang memiliki akal mustafad yang dapat berkomunikasi dengan akal kesepuluh atau akal aktif. Dalam hal ini, menurut Al-Farabi, pemimpin ideal bukan hanya seorang filosof, melainkan juga Nabi. Sebab keduanya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan akal kesepuluh. Pandangan Al-Farabi ini berangkat dari filsafat kenabiannya.³¹ Oleh karena itu, konsepsi Al-Farabi mengenai pemimpin yang ideal memiliki perbedaan dengan Platon. Dalam pemikiran Al-Farabi terdapat ciri khusus yang menjadi syarat utama yang harus dimiliki pemimpin ideal, yakni mampu berkomunikasi dengan akal aktif atau akal kesepuluh.

³¹ Dalam pandangan Al-Farabi, antara filosof dengan Nabi memiliki sumber pengetahuan yang sama, yakni bersumber dari akal aktif atau akal kesepuluh, yang membedakan hanya cara memperolehnya.

Tujuan negara yang dipaparkan oleh kedua filsuf ini juga memiliki perbedaan. Dalam pemikiran politik Platon, tujuan negara adalah kebahagiaan yang berupa kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tersebut akan tercapai apabila setiap kelas dalam masyarakat dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu, dalam teorinya tentang negara ideal, Platon secara rinci menguraikan struktur-struktur kelas masyarakat dalam negara. Berbeda dengan Platon, tujuan negara bagi Al-Farabi tidak hanya kebaikan yang bersifat duniawi (kesejahteraan masyarakat), melainkan juga ukhrawi. Dengan kata lain, tujuan pemerintahan ialah menjamin kebahagiaan duniawi dan ukhrawi dalam masyarakat.

Kedua filosof ini juga menguraikan secara mendetail keragaman penyimpangan dari keadaan politik ideal. Uraian Platon tentang penyimpangan dari kondisi politik ideal tersebut berupa klasifikasi bentuk-bentuk pemerintahan yang baik dan buruk. Platon menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang sesuai dengan cita-cita negara ideal adalah aristokrasi, dan yang paling tidak sesuai adalah tirani. Sedangkan dalam pemikiran Al-Farabi, uraian tersebut juga berupa pembagian negara, antara jenis negara yang baik dengan yang buruk. Berbeda dengan Platon, Al-Farabi menguraikan ciri masyarakat dan pemerintahan yang terdapat dalam setiap jenis negara, seperti negara utama dan negara jahil. Dalam hal ini, Al-Farabi tidak banyak berbicara mengenai bentuk-bentuk pemerintahan. Melainkan hanya memusatkan perhatian pada ciri-ciri umum yang terdapat dalam negara, yang meliputi ciri pemimpin dan masyarakat.

Selain mengklasifikasikan rezim politik antara yang baik dan buruk, Al-Farabi juga mengklasifikasikan bentuk masyarakat. Pemikirannya tentang bentuk masyarakat ini merupakan sesuatu hal yang baru dalam filsafat politiknya, yang tidak ditemukan dalam pemikiran filsafat politik Platon. Analisa Platon hanya berhenti pada penjelasan tentang struktur masyarakat dalam negara ideal, namun tidak berbicara mengenai bentuk masyarakat yang sempurna dan masyarakat tidak sempurna. Berbeda dengan Platon, Al-Farabi menjelaskan tentang ciri masyarakat sempurna dan tidak sempurna. Al-Farabi membagi dua macam masyarakat, yakni masyarakat sempurna dan masyarakat tidak sempurna. Pemikirannya tentang masyarakat ini berangkat dari pemikiran Platon dalam *Republic*, dan pemikiran Aristoteles tentang manusia sebagai makhluk sosial. Dari sini dapat diketahui bahwa pemikiran politik tidak hanya dipengaruhi Platon, melainkan juga dipengaruhi oleh Aristoteles.

Perbedaan-perbedaan dalam pemikiran politik Al-Farabi dengan filsafat politik yang dikembangkan Platon telah menunjukkan bahwa pemikiran politik Al-Farabi memiliki karakteristik tersendiri. Dalam pemikiran filsafat politik Al-Farabi, terdapat pemaduan antara Agama dengan filsafat. Perpaduan tersebut tampak pada pandangannya yang menempatkan kebahagiaan ukhrawi sebagai tujuan dalam pemerintahan. Serta pandangannya tentang pemimpin ideal, di mana Nabi diposisikan sebagai pemimpin yang ideal karena memiliki akses terhadap akal kesepuluh (akal aktif). Dari sini terlihat bahwa pemikiran filsafat politik Al-Farabi merupakan sebuah elaborasi yang didasarkan pada pemikiran politik Platon. Al-Farabi berusaha mengelaborasi pemikiran Platon dengan mengintegrasikannya dengan Akidah. Perpaduan yang tampak dalam pemikiran politik Al-Farabi menjadi karakteristik yang khas. Dalam hal ini, sangat tepat apabila dikatakan bahwa Al-Farabi adalah Platon dalam mantel Nabi Muhammad.

F. Kesimpulan

Orisinalitas pemikiran filsafat dalam filsafat Islam melahirkan perdebatan antara para cendekiawan muslim dengan para orientalis. Sebagian kalangan orientalis secara kritis mempertanyakan terkait orisinalitas pemikiran para filosof Islam. Sebagaimana yang diketahui secara lazim, pemikiran filsafat Yunani sangat mempengaruhi para filosof Islam. Akan tetapi, para filosof Islam tidak hanya memasukkan ajaran Yunani ke dalam pemikiran filsafatnya. Melainkan mereka berusaha mengelaborasi pemikiran Yunani dengan mengintegrasikannya dengan akidah. Integrasi antara akidah dengan filsafat tersebut salahsatunya tampak dalam pemikiran politik Al-Farabi yang sangat dipengaruhi Platon. Al-Farabi berusaha mengelaborasi pemikiran filsafat politik Platon. Hasil elaborasi ini, tentu melahirkan teori politik yang berbeda dengan Platon.

Perbedaan pemikiran politik antara Al-Farabi dengan Platon, terletak pada analisa tentang pemimpin yang ideal. Berangkat dari filsafat pendidikan dan filsafat jiwanya, Platon menyatakan bahwa pemimpin ideal adalah filosof. Sedangkan menurut Al-Farabi berpandangan bahwa pemimpin ideal adalah seorang nabi dan filosof. Pandangan tersebut berangkat dari filsafat kenabiannya. Perbedaan pemikiran filsafat politik antara Al-Farabi dan Platon juga tampak pada penjelasan tentang tujuan negara dan klasifikasi tatanan pemerintahan, di mana keduanya mengklasifikasikan tatanan pemerintahan yang baik (sesuai dengan negara ideal) dan tatanan pemerintahan yang buruk (menyimpang dari ciri yang

dimiliki negara ideal). Melalui perbedaan pemikiran filsafat politik tersebut, terlihat jelas bahwa dalam pemikiran politik Al-Farabi terdapat intergrasi antara akidah dan filsafat. Perpaduan antara akidah dengan filsafat ini menjadi karakteristik yang khas dalam pemikiran filsafat politik Al-Farabi.

Daftar Pustaka

- Hadiwijoyo, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*. Yogyakarta: Kanisius, 1980.
- Hatta, Muhammad. *Alam Pikiran*. Jakarta: UI Press, 1980.
- James, Garvey. *20 Karya Filsafat Terbesar*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Leaman, Oliver. *Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam Jilid I*. Bandung: Mizan, 2003.
- . *Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam Jilid II*. Bandung: Mizan, 2003.
- Maftukhin. *Filsafat Islam*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Maksum, Ali. *Pengantar Filsafat: Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Muhammad, Ali Abdul Mu'ti. *Filsafat Politik Antara Barat Dan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Naaman, Erez. "Nurture over Nature: Habitus from al-Fārābī through Ibn Khaldūn to 'Abduh." *Journal of the American Oriental Society* 137, no. 1 (2017): 1–24. <https://doi.org/10.7817/jameroriesoci.137.1.0001>.
- Pormann, Peter E. "Al-Fārābī, the Melancholic Thinker and Philosopher Poet." *Journal of the American Oriental Society* 135, no. 2 (2015): 209–24. <https://doi.org/10.7817/jameroriesoci.135.2.209>.
- Roswanto, Alim. "Filsafat Sosial-Politik Plato Dan Aristoteles." *Jurnal Refleksi* 15, no. 2 (2015).
- Said, Abdullah. "Filsafat Politik Al-Farabi." *Islamic Theology and Philosophy* 1, no. 1 (2019).
- Supena, Ilyas. *Filsafat Islam*. Yogyakarta: Ombak Dua, 2013.
- SWEENEY, MICHAEL. "GREEK ESSENCE AND ISLAMIC TOLERANCE: AL-FARABI, AL-GHAZALI, IBN RUSH'D." *The Review of Metaphysics* 65, no. 1 (2011): 41–61.
- Watt, John W. "From Themistius to Al-Farabi: Platonic Political Philosophy and Aristotle's Rhetoric in the East." *Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric* 13, no. 1 (1995): 17–41. <https://doi.org/10.1525/rh.1995.13.1.17>.
- Zar, Sirajuddin. *Filsafat Islam: Filosof Dan Filsafatnya*. Depok: Raja Grafindo, 2017.

